BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 68 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 360 ayat (1) dan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubaha Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);

15. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Seri E Nomor 1);

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Seri D Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Seri D Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri E Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 27);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 69) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 154);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah

Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri E Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 141);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri E Nomor 147, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 161);
28. Peraturan Bupati Tuban Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2022 Seri E Nomor 6);
29. Peraturan Bupati Tuban Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2022 Seri E Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas, Badan dan Kecamatan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

6. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
7. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat denga RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan.
12. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
14. Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

15. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
16. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas yang merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
17. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
18. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
19. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
20. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
21. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome)* beberapa program.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perubahan perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan beserta perubahannya sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

kabupaten/kota sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perubahan Tahun Anggaran 2022 dan sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD 2022.

Perubahan Renja Perangkat Daerah mempunyai tujuan untuk menjamin konsistensi perencanaan tahun 2022 terhadap program dan kegiatan yang disusun dalam Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD Tahun 2022 dan sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja berdasarkan target indikator program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

	BAB I	:	PENDAHULUAN.
a.			Mengemukakan gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan sistematika penulisan.
b.	BAB II	:	EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN. Memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II serta penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.
c.	BAB IV	:	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pembangunan.

e. BAB VI : PENUTUP.

BAB V

ISI DAN URAIAN RENCANA KERJA

Pasal 5

Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2022 dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang meliputi:

a. Lampiran I:
   1. Sekretariat Daerah;
   2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   3. Inspektorat Daerah;
   4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
   5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
   6. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
   7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
   8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
   9. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
   10. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
   11. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata;
   12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
   13. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan;
   14. Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
   15. Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan;
   16. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;

17. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
18. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
19. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
20. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
21. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; dan
22. Dinas Pendidikan.

b. Lampiran II:
1. Kecamatan Tuban;
2. Kecamatan Merakurak;
3. Kecamatan Semanding;
4. Kecamatan Palang;
5. Kecamatan Jenu;
6. Kecamatan Bancar;
7. Kecamatan Jatirogo;
8. Kecamatan Bangilan;
9. Kecamatan Grabagan;
10. Kecamatan Senori;
11. Kecamatan Kenduruan;
12. Kecamatan Montong;
13. Kecamatan Kerek;
14. Kecamatan Tambakboyo;
15. Kecamatan Singgahan;
16. Kecamatan Parengan;
17. Kecamatan Soko;
18. Kecamatan Rengel;
19. Kecamatan Plumpang; dan
20. Kecamatan Widang.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Disahkan di Tuban
pada tanggal 31 Agustus 2022

BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 31 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,

BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2022 SERI E NOMOR

14. PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN TUBAN TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan dan pendanaan yang berisi program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (PRKPD) dan Rencana Startegis (Renstra) Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran disertai dengan pagu pendanaannya. Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2022 yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunannya adalah Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021-2026 dan RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2022. Program dan kegiatan yang dijabarkan dalam matrik meliputi program, kegiatan dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan sumber dana.

Rencana kerja perangkat daerah disusun untuk memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sedangkan tahapan dan tata cara penyusunannya secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembanguan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, kedudukan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan dengan dokumen perencanaan ditingkat atas. Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun oleh kepala perangkat daerah sebagai acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya untuk mendukung pencapaian target-target kinerja di dalam Renstra perangkat daerah yang telah ditetapkan yang akan bermuara dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah sebagai dokumen turunan dari PRKPD.

Penyusunan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dimulai dari tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja, penyusunan Rancangan Rencana Kerja, penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja dan Penetapan Rencana Kerja. Mekanisme dan waktu penyusunan Perubahan Rencana Kerja bersinergi dengan penyusunan PRKPD, karena pada dasarnya RKPD merupakan rangkuman dari Rencana Kerja-Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dikolaborasi menjadi dokumen perencanaan tahunan daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun harus mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun sebelumnya. Selanjutnya Rencana Kerja Perangkat Daerah akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Perubahan (RKAP) Perangkat Daerah dalam Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Bupati Tuban Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2022;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

1. Memberikan informasi pencapaian hasil tahun sebelumnya serta kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
2. Menjabarkan rencana strategis perencanaan pembangunan yang telah dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah dalam bentuk rencana kerja dan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana kerja;

1.3.2 Tujuan

1. Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan RKAP-DPPA Tahun

2022;

2. Memberikan informasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2021;
3. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan pagu dan indikatifnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika dokumen Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2022 sebagaimana mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembanguan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah, proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SK Perangkat Daerah.

1.3 Maksud danTujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dari Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.
1.2. Landasan Hukum.
1.3. Maksud dan Tujuan.
1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TRIBULAN II TAHUN 2022.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
2.4. Review terhadap Rencangan Awal RKPD Perangkat Daerah.
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TRIBULAN II TAHUN 2022

Untuk menentukan Perubahan perencanaan pembangunan Tahun 2022 diperlukan evaluasi hasil capaian Tribulan II Tahun 2022 dan perkiraan pencapaian hasil Tahun 2022. Adapun hasil pencapaian Tribulan II Tahun 2022 dan perkiraan pencapaian Tahun 2022 akan diurutkan sesuai program.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Tahun 2022 merupakan merupakan Tahun pertama pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2021-2026 yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026. Pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022 merupakan salah satu upaya untuk mencapai sasaran startegis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Indikator kinerja sasaran Tahun 2022 merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Periode Tahun 2016-2021. Pencapaian kinerja Tahun 2021 dibandingkan dengan capaian kinerja tahun terakhir periode 2022 dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian selama 5 tahun kedepan dalam mencapai target akhir periode. Realisasi pencapaian indikator kinerja sasaran Tahun 2022 sampai Tribulan ke 2 adalah sebagi berikut :

Tabel 2.1
Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Perencanaan Daerah
Tribulan II Tahun 2022

Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2022	Tingkat Capaian Tribulan II Tahun 2022	Target Akhir Renstra
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
Meningkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informatika serta Layanan Publik	Persentase Cakupan Layanan Sistem dan Jaringan TIK	100%	100%	100%
	Terintegrasinya Sistem Informasi di OPD	50%		75%
	Prosentase OPD yang Menggunakan Data Statistik dalam melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	25%	7%	100%
Meningkatnya pelayanan informasi publik	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Informasi	77,01		90,01

Dari keempat indikator sasaran diatas maka pencapaian pada Tribulan II Tahun 2022 apabila dibandingkan dengan target sasaran akhir Renstra masih perlu kerja keras sesuai target pencapaian tahunnya untuk mencapai target

akhir tersebut. Untuk mencapai target pada masa akhir periode Renstra Tahun 2026 harus dilakukan dengan berbagai upaya sesuai dengan tahapan target tiap tahunnya.

Dalam upaya pencapaian sasaran strategis tersebut tentu saja diimbangi dengan program kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian merupakan pelaksana urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, serta perubahan Peraturan Bupati Nomor Nomor 59 Tahun 2019, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah untuk melaksanakan tugas tersebut menyelenggarakan fungsi :

2.2.1. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informasi publik, pemberdayaan dan pengembangan teknologi informasi, serta integrasi data dan keamanan informasi;

2.2.2. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informasi publik, pemberdayaan dan pengembangan teknologi informasi, serta integrasi data dan keamanan informasi;

2.2.3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informasi publik, pemberdayaan dan pengembangan teknologi informasi, serta integrasi data dan keamanan informasi;

2.2.4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang komunikasi dan informasi publik, pemberdayaan dan pengembangan teknologi informasi, serta integrasi data dan keamanan informasi;

Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban meliputi :

a. INFRASTRUKTUR JARINGAN TIK merupakan layanan fasilitasi keterhubungan antar OPD untuk mengintegrasikan sistem informasi dan database dalam rangka mengimplementasikan e-Goverment dan layanan publik berbasis TIK yang diintegrasikan dengan aplikasi pelayanan publik berbasis website.

b. PENERAPAN TATA KELOLA TIK dalam hal ini Pemeringkatan e-Gov merupakan kegiatan yang diadakan dalam rangka untuk melihat peta kondisi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh lembaga-lembaga pemerintah secara nasional yang tujuannya adalah sebagai berikut:
   1. Menyediakan acuan bagi pengembangan dan pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah.
   2. Memberikan dorongan bagi peningkatan pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah melalui evaluasi yang utuh, seimbang, dan obyektif.
   3. Mendapatkan peta kondisi pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah Kabupaten Tuban pada khususnya dan secara nasional pada umumnya.

c. FASILITASI COLOCATION DAN HOSTING merupakan pelayanan teknis kepada OPD Kabupaten Tuban dengan menempatkan server dan aplikasinya untuk memperoleh fasilitas akses internet dalam mendukung layanan informasi publik;

d. SATU DATA adalah kebijakan tata kelola data Pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Kementerian/Lembaga dan Perangkat Daerah, melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.

e. KEAMANAN INFORMASI untuk mengevaluasi keamanan informasi yang ada di Kabupaten Tuban, adapun evaluasi dilakukan terhadap beberapa area target penerapan keamanan informasi dengan ruang lingkup pembahasan yang juga memenuhi semua aspek keamanan;

f. TELEKOMUNIKASI merupakan kegiatan pelayanan, pembinaan, pengawasan, perizinan bidang telekomunikasi;

g. PEMBERDAYAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) merupakan upaya untuk memberdayakan lembaga komunikasi sosial yang berbasis kelompok masyarakat dengan tugas untuk mengumpulkan, mengolah dan

menyebarluaskan informasi khususnya yang berkenaan dengan potensi wilayah sekitarnya.

h. TAPROSE TEMANKU (Tuban Public Report Services – Tempat Masyarakat Mengadu) merupakan aplikasi baru yang dirancang oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tuban dalam rangka memberikan layanan informasi publik dan mempermudah akses komunikasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui aplikasi berbasis web dan aplikasi berbasis mobile android.

i. SEPASI (Sistem Elektronik Pengelolaan Arsip Surat Internal) merupakan Aplikasi untuk mengelola arsip surat perkantoran secara elektronik melalui aplikasi berbasis web dan aplikasi berbasis mobile android.

Capaian Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan baik dalam Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban serta Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tuban

No	Indikator	SPM / Standart nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian	Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)
1.	Persentase Cakupan Layanan Sistem dan Jaringan TIK	-	-	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
2.	Terintegrasinya Sistem Informasi di OPD	-	-	50%	55%	65%	70%	75%		55%	
3.	Prosentase OPD yang Menggunakan Data Statistik dalam melakukan Evaluasi	-	-	25%	50%	75%	100%	100%	7%	50%	

No	Indikator	SPM / Standart nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian	Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)
	Pembangunan Daerah										
4.	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Informasi	-	-	77,01	80,01	85,01	89,01	90,01		80,01	

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022
Kabupaten Tuban

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	80,01 Poin	7.211.630.670	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	80,01 Poin	7.211.630.670	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Evaluasi Perangkat Daerah	9 Doku-men	96.161.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Evaluasi Perangkat Daerah	9 Doku-men	96.161.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengendalian	5 Dokumen	54.219.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengendalian	5 Dokumen	54.219.500	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi, Pelaporan, dan Publikasi	5 Dokumen	41.941.500	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi, Pelaporan, dan Publikasi	5 Dokumen	41.941.500	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Keuangan	9 Dokumen	3.939.018.400	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Keuangan	9 Dokumen	3.939.018.400	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Orang Penerima Gaji dan Tunjangan	33 Orang	3.804.114.400	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Orang Penerima Gaji dan Tunjangan	33 Orang	3.804.114.400	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	80.640.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	80.640.000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	54.264.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	54.264.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	0 doku-men	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	0 doku-men	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	0 Tahun	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	0 Tahun	0	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo		0 Tahun	0	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo		0 Tahun	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Realisasi Anggaran										
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Sumber Dana Aparatur yang Mengikuti Kompetensi	71 Orang	2.347.785.480	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Sumber Dana Aparatur yang Mengikuti Kompetensi	71 Orang	2.347.785.480	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapanny a yang disediakan	0 unit	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapanny a yang disediakan	0 unit	0	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Aparatur dalam Peningkatan Kompetensi	7 Apara-tur	24.920.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Aparatur dalam Peningkatan Kompetensi	7 Apara-tur	24.920.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Penyampaian Informasi Ketentuan Perundang-Undangan Bidang Cukai kepada Masyarakat dan Pemangku Kepentingan	60 Kali	2.183.905.200	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Penyampaian Informasi Ketentuan Perundang-Undangan Bidang Cukai kepada Masyarakat dan Pemangku Kepentingan	60 Kali	2.183.905.200	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Aparatur dalam Peningkatan Kompetensi Jumlah Aparatur dalam	7 Apara-tur 29 Apara-tur	136.960.280	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Aparatur dalam Peningkatan Kompetensi Jumlah Aparatur	7 Apara-tur 29 Apara-tur	136.960.280	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			peningkatan Kompetensi					dalam peningkatan Kompetensi			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Sarana dan Prasarana yang diadakan	1 Tahun	203.955.600	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Sarana dan Prasarana yang diadakan	1 Tahun	203.955.600	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Peralatan Perkantoran	1 Tahun	9.998.700	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Peralatan Perkantoran	1 Tahun	9.998.700	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Peralatan Perkantoran	1 Tahun	29.955.300	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Peralatan Perkantoran	1 Tahun	29.955.300	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Peralatan Perkantoran	1 Tahun	38.788.600	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Peralatan Perkantoran	1 Tahun	38.788.600	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Peralatan Perkantoran	1 Tahun	15.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Peralatan Perkantoran	1 Tahun	15.000.000	
	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah yang Diikuti	36 kali	110.213.000	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah yang Diikuti	36 kali	110.213.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		Jumlah sarana dan Prasarana yang diadakan	0 Unit	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah sarana dan Prasarana yang diadakan	0 Unit	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemerintah Daerah										
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Tersedianya Kendaraan Operasional	0 Unit	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Tersedianya Kendaraan Operasional	0 Unit	0	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran Jumlah Sarana dan Prasarana yang diadakan	0 Tahun 0 Tahun	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran Jumlah Sarana dan Prasarana yang diadakan	0 Tahun 0 Tahun	0	
	Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor	0 Unit	0	Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor	0 Unit	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Sarana dan Prasarana yang diadakan	1 Tahun	379.396.990	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Sarana dan Prasarana yang diadakan	1 Tahun	379.396.990	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran	1 Tahun	28.247.267	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran	1 Tahun	28.247.267	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran	1 Tahun	275.950.923	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran	1 Tahun	275.950.923	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran	1 Tahun	20.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran	1 Tahun	20.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran	1 Tahun	55.198.800	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran	1 Tahun	55.198.800	
	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Sarana dan Prasarana yang diadakan	1 Tahun	245.313.200	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Sarana dan Prasarana yang diadakan	1 Tahun	245.313.200	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Kendaraan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran Jumlah Sarana dan Prasarana yang diadakan	1 Tahun 1 Tahun	78.434.300	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Kendaraan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran Jumlah Sarana dan Prasarana yang diadakan	1 Tahun 1 Tahun	78.434.300	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	atau Kendaraan Dinas Jabatan					atau Kendaraan Dinas Jabatan					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah sarana dan Prasarana yang diadakan	1 Tahun	84.955.900	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah sarana dan Prasarana yang diadakan	1 Tahun	84.955.900	
	Pemeliharaan Mebel	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Diadakan	1 Tahun	10.000.000	Pemeliharaan Mebel	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Diadakan	1 Tahun	10.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran Jumlah Sarana dan Prasarana yang diadakan	1 Tahun 1 Tahun	71.923.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran Jumlah Sarana dan Prasarana yang diadakan	1 Tahun 1 Tahun	71.923.000	
2	Program Informasi dan Komunikasi Publik		Persentase Masyarakat yang menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetauin Kebijakan dan Program Prioritas	99 %	1.788.196.151	Program Informasi dan Komunikasi Publik		Persentase Masyarakat yang menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetauin Kebijakan dan Program Prioritas	99 %	1.788.196.151	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Pemerintah dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota					Pemerintah dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota			
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah kabupaten/Kota		Jumlah Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	4 Jenis	1.788.196.151	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah kabupaten/Kota		Jumlah Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	4 Jenis	1.788.196.151	
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Jenis Penyebaran Informasi Jumlah Media Penerbitan Informasi	3 Jenis 8000 Eksemplar	820.822.000	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Jenis Penyebaran Informasi Jumlah Media Penerbitan Informasi	3 Jenis 8000 Eksemplar	820.822.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Persentase Konten Informasi terkait Program dan Kebijakan pemerintah dan Pemerintah Kabupaen/Kota sesuai dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM)	75%				Persentase Konten Informasi terkait Program dan Kebijakan pemerintah dan Pemerintah Kabupaen/Kota sesuai dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM)	75%		
	Pelayanan Informasi Publik	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Tersedianya Informasi yang Disampaikan kepada	350 Doku-men	188.800.000	Pelayanan Informasi Publik	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Tersedianya Informasi yang Disampaikan kepada	350 Doku-men	188.800.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Masyarakat melalui PPID, Taprose, Website Persentase Diseminasi dan Layanan Informasi Publik yang Dilaksanakan sesuai dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	75%				Masyarakat melalui PPID, Taprose, Website Persentase Diseminasi dan Layanan Informasi Publik yang Dilaksanakan sesuai dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	75%		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Layanan Hubungan Media	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Dokumentasi dan Publikasi, Jumlah Press Rilis	270 Doku-men 135 Doku-men	642.575.051	Layanan Hubungan Media	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Dokumentasi dan Publikasi, Jumlah Press Rilis	270 Doku-men 135 Doku-men	642.575.051	
	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat Persentase Komunitas Masyarakat/Mitra Strategis Pemerintah Daerah	10 Kali 100%	135.999.100	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat Persentase Komunitas Masyarakat/Mitra Strategis Pemerintah Daerah	10 Kali 100%	135.999.100	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Kabupaten/Kota yang Menyebarkan Informasi dan Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota					Kabupaten/Kota yang Menyebarkan Informasi dan Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota			
3	Program Aplikasi Informatika		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung Dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	4.262.780.000	Program Aplikasi Informatika		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung Dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	4.262.780.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Perangkat Daerah yang Terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau Menggunakan Akses Internet yang Diamankan yang Disediakan oleh Kominfo Persentase Perangkat Daerah dan Pelayanan Publik pada	100%	3.000.000.000	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Perangkat Daerah yang Terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau Menggunakan Akses Internet yang Diamankan yang Disediakan oleh Kominfo Persentase Perangkat Daerah dan Pelayanan Publik pada	100%	3.000.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Pemerintah Daerah yang Dimanfaatkan secara Daring dengan Memanfaatkan Domain dan Sub Domain Instansi Pemerintah					Pemerintah Daerah yang Dimanfaatkan secara Daring dengan Memanfaatkan Domain dan Sub Domain Instansi Pemerintah			
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Akses Internet yang Berkualitas	100%	3.000.000.000	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Akses Internet yang Berkualitas	100%	3.000.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			yang Disediakan Dinas Kominfo					yang Disediakan Dinas Kominfo			
	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Layanan SPBE (Layanan Publik dan Layanan Administrasi Pemerintahan) yang tercantum dalam Dokumen Proses Bisnis yang Telah Diimplementasikan secara Elektronik	75%	1.262.780.000	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Layanan SPBE (Layanan Publik dan Layanan Administrasi Pemerintahan) yang tercantum dalam Dokumen Proses Bisnis yang Telah Diimplementasikan secara Elektronik	75%	1.262.780.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	0 Cukup 0 Baik	100.000.000	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	0 Cukup 0 Baik	100.000.000	
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan daerah	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Persentase perangkat Daerah yang Mempengaruhi Datanya sesuai Siklus Jenis Data Persentase Perangkat	25 % 90%	174.780.000	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan daerah	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Persentase perangkat Daerah yang Mempengaruhi Datanya sesuai Siklus Jenis Data Persentase Perangkat	25 % 90%	174.780.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Daerah yang Menggunakan layanan Pusat data Pemerintah Persentase Perangkat daerah yang Menyimpan Data di Pusat data Pemerintah	25%				Daerah yang Menggunakan layanan Pusat data Pemerintah Persentase Perangkat daera yang Menyimpa Data di Pusa data Pemerintah	25%		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Aplikasi yang Terintegrasi	4 Aplikasi	380.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Aplikasi yang Terintegrasi	4 Aplikasi	380.000.000	
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis	Kab. Tuban, Tuban,	Jumlah Sistem Informasi Persentase	4 Aplikasi 75%	310.000.000	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis	Kab. Tuban, Tuban,	Jumlah Sistem Informasi Persentase	4 Aplikasi 75%	310.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemerintahan Berbasis Elektronik	Sidorejo	Layanan SPBE (Layanan Publik dan Layanan Administrasi Pemerintahan) yang Memanfaatkan Sertifikat Elektronik			Pemerintahan Berbasis Elektronik	Sidorejo	Layanan SPBE (Layanan Publik dan Layanan Administrasi Pemerintahan) yang Memanfaatkan Sertifikat Elektronik			
	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Evaluasi indikator dari kota cerdas Keikutsertaan pameran smart city Pelaksanaan video conference	0 Baik 1 kali 30 kali	140.200.000	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Evaluasi indikator dari kota cerdas Keikutsertaan pameran smart city Pelaksanaan video conference	0 Baik 1 kali 30 kali	140.200.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			dan video streaming Pengembangan Aplikasi Tuban Smat City	2 Aplikasi				dan video streaming Pengembangan Aplikasi Tuba Smat City	2 Aplikas		
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Website Desa yang Aktif Pengelolaan Videotron Peningkatan pengetahuan TIK masyarakat Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan	311 Webdes 4 Unit 311 Orang 75%	157.800.000	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Website Desa yang Aktif Pengelolaan Videotron Peningkatan pengetahuan TIK masyarakat Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada	311 Webdes 4 Unit 311 Orang 75%	157.800.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			publik pada pemerintah daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No. 5/2015					pemerintah daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No. 5/2015			
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral		Persentase perangkat daerah yang	20%	648.480.500	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral		Persentase perangkat daerah yang	20%	648.480.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah					menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah			
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup daerah Kabupaten/Kota		Mengukur persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik	3 Jenis	648.480.500	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup daerah Kabupaten/Kota		Mengukur persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik	3 Jenis	648.480.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah					dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah dokumen Statistik yang disediakan Jumlah menara telekomunikasi yang dimonitoring dan evaluasi di wilayah kabupaten Tuban (manara)	450 Dok-umen 250 Menara		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah dokumen Statistik yang disediakan Jumlah menara telekomunikasi yang dimonitoring dan evaluasi di wilayah kabupaten Tuban (manara)	450 Doku-men 250 Menara		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah pelatihan (Capasiti building) bidang statistik Jumlah SDM Statistik yang terlatih	0 kali 0 orang	0	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah pelatihan (Capasiti building) bidang statistik Jumlah SDM Statistik yang terlatih	0 kali 0 orang		
	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Persentase pemenuhan ketersediaan metadata statistik sektoral	60%	200.000.000	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Persentase pemenuhan ketersediaan metadata statistik sektoral	60%	200.000.000	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Terlaksananya Sosialisasi Data Statistik Sektoral	3 kali	100.000.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Terlaksananya Sosialisasi Data Statistik Sektora	3 kali	100.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengembangan Insfrastruktur	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah sistem aplikasi informasi pusat pengelolaan data statistik (PUSDATIK)	1 Aplikasi	130.000.000	Pengembangan Insfrastruktur	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah sistem aplikasi informasi pusat pengelolaan data statistik (PUSDATIK)	1 Aplikasi	130.000.000	
	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Rekomendasi Statistik Sektoral	0 Dokum en	0	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah Rekomendasi Statistik Sektora	0 Doku-men		
	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi		Tingkat keamanan informasi pemerintah	25%	150.562.500	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi		Tingkat keamanan informasi pemerintah	25%	150.562.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase Peningkatan Sistem Informasi yang Menerapkan Manajemen Kemanan Informasi	25%	150.562.500	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase Peningkatan Sistem Informasi yang Menerapkan Manajemen Kemanan Informasi	25%	150.562.500	
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah sistem Informasi yang menerapkan manajemen kemanan informasi	2 Sistem	150.562.500	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Tuban, Sidorejo	Jumlah sistem Informasi yang menerapkan manajemen kemanan informasi	2 Sistem	150.562.500	

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2022

Kabupaten Tuban

Nama Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	N	I	H	I	L

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam upaya untuk mencapai target-target sasaran yang telah ditetapkan maka berikut ini disampaikan program dan kegiatan yang direncanakan untuk mencapai target-target sasaran tersebut yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 4.1

Rincian Perubahan APBD Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2022

Per Urusan, Per Program, Per Kegiatan dan Per Sub Kegiatan

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Selisih Dengan Pagu Anggaran
		Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			13.055.800.755			14.393.881.365	1.338.080.610
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUDAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	80,01 Poin	7.107.214.756	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	80,01 Poin	5.577.696.586	-1.529.518.170
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	9 Dokumen	92.060.100	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	9 Dokumen	100.145.600	8.085.500
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil	5 Dokumen	50.119.400	Jumlah Dokumen Hasil	5 Dokumen	53.169.900	3.050.500

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Selisih Dengan Pagu Anggaran
		Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan dan Pengendalian			Perencanaan dan Pengendalian			
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi, Pelaporan, dan Publikasi	5 Dokumen	41.940.700	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi, Pelaporan, dan Publikasi	5 Dokumen	46.975.700	5.035.000
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan	9 Dokumen	3.854.412.957	Jumlah Dokumen Keuangan	9 Dokumen	4.168.296.183	313.883.226
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Penerima Gaji dan Tunjangan	33 Orang	3.719.870.957	Jumlah Orang Penerima Gaji dan Tunjangan	33 Orang	4.059.539.183	339.668.226
2.16.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	12 Dokumen	80.280.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	12 Dokumen	54.495.000	-25.785.000
2.16.01.2.	Koordinasi dan	Jumlah	9	54.262.000	Jumlah	9	54.262.000	0

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Selisih Dengan Pagu Anggaran
		Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
02.04	Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen Hasil Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen Hasil Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen		
2.16.01.2. 02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	0 Dokumen	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	0 Dokumen	0	0
2.16.01.2. 02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	0 Tahun	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	0 Tahun	0	0
2.16.01.2. 02.08	Peyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	0 Tahun	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	0 Tahun	0	0

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Selisih Dengan Pagu Anggaran
		Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang mengikuti Kompetensi	71 Orang	2.336.250.600	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang mengikuti Kompetensi	71 Orang	152.345.400	-2.183.905.200
2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya yang disediakan	0 unit	0	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya yang disediakan	0 unit	0	0
2.16.01.2.05.10	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur dalam Peningkatan Kompetensi	7 Aparatur	13.400.000	Jumlah Aparatur dalam Peningkatan Kompetensi	7 Aparatur	13.400.000	0
2.16.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyampaian Informasi Ketentuan Perundang-undagan	60 Kali	2.183.905.200	Jumlah Penyampaian Informasi Ketentuan Perundang-undagan	60 ali	0	-2.183.905.200

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Selisih Dengan Pagu Anggaran
		Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan Pemangku Kepentingan			Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan Pemangku Kepentingan			
2.16.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparatur dalam Peningkatan Kompetensi Jumlah Aparatur dalam Peningkatan Kompetensi	7 Aparatur 29 Aparatur	138.945.400	Jumlah Aparatur dalam Peningkatan Kompetensi Jumlah Aparatur dalam Peningkatan Kompetensi	7 Aparatur 29 Aparatur	138.945.400	0
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana yang diadakan	1 Tahun	203.943.300	Jumlah Sarana dan Prasarana yang diadakan	1 Tahun	325.384.533	121.441.233
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Peralatan Perkantoran	1 Tahun	9.995.600	Jumlah Peralatan Perkantoran	1 Tahun	9.995.600	0

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Selisih Dengan Pagu Anggaran
		Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Bangunan Kantor							
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Perkantoran	1 Tahun	29.955.100	Jumlah Peralatan Perkantoran	1 Tahun	54.469.500	24.514.400
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Peralatan Perkantoran	1 Tahun	38.780.100	Jumlah Peralatan Perkantoran	1 Tahun	54.162.500	15.382.400
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Peralatan Kantor	1 Tahun	15.000.000	Jumlah Peralatan Kantor	1 Tahun	30.000.000	15.000.000
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah yang Diikuti	36 Kali	110.212.500	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah yang Diikuti	36 Kali	178.756.933	68.544.433
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana yang diadakan	0 unit	0	Jumlah Sarana dan Prasarana yang diadakan	0 unit	0	0
2.16.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas	Tersedianya Kendaraan	0 unit	0	Tersedianya Kendaraan	0 unit	0	0

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Selisih Dengan Pagu Anggaran
		Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Operasional atau Lapangan	Operasional			Operasional			
2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran Jumlah Sarana dan Prasarana yang diadakan	0 Tahun 0 Tahun	0	Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran Jumlah Sarana dan Prasarana yang diadakan	0 Tahun 0 Tahun	0	0
2.16.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor	0 unit	0	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor	0 unit	0	0
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana yang diadakan	1 Tahun	379.259.249	Jumlah Sarana dan Prasarana yang diadakan	1 Tahun	478.742.069	99.482.820
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran	1 Tahun	28.245.800	Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran	1 Tahun	25.976.800	-2.269.000
2.16.01.2.	Penyediaan Jasa	Jumlah Jasa	1 Tahun	275.949.049	Jumlah Jasa	1 Tahun	379.830.869	103.881.820

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Selisih Dengan Pagu Anggaran
		Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
08.02	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Administrasi Perkantoran			Administrasi Perkantoran			
2.16.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran	1 Tahun	19.870.000	Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran	1 Tahun	31.690.000	11.820.000
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran	1 Tahun	55.194.400	Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran	1 Tahun	41.244.400	-13.950.000
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana yang diadakan	1 Tahun	241.288.550	Jumlah Sarana dan Prasarana yang diadakan	1 Tahun	352.782.801	111.494.251
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran Jumlah Sarana dan Prasarana yang diadakan	1 Tahun 1 Tahun	78.428.200	Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran Jumlah Sarana dan Prasarana yang diadakan	1 Tahun 1 Tahun	78.428.200	0

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Selisih Dengan Pagu Anggaran
		Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang diadakan	1 Tahun	80.943.100	Jumlah Sarana dan Prasarana yang diadakan	1 Tahun	92.843.101	11.900.001
2.16.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Sarana dan Prasarana yang diadakan	1 Tahun	10.000.000	Jumlah Sarana dan Prasarana yang diadakan	1 Tahun	17.600.000	7.600.000
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran Jumlah Sarana dan Prasarana Yang diadakan	1 Tahun 1 Tahun	71.917.250	Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran Jumlah Sarana dan Prasarana Yang diadakan	1 Tahun 1 Tahun	163.911.500	91.994.250
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI	Presentase Masyarakat yang menjadi	99%	1.758.195.550	Presentase Masyarakat yang menjadi	99%	3.532.887.400	1.774.691.850

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Selisih Dengan Pagu Anggaran
		Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	PUBLIK	sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota			sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota			
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	4 Jenis	1.758.195.550	Jumlah Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	4 Jenis	3.532.887.400	1.774.691.850
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komuniksi Publik	Jumlah Jenis penyebaran informasi	3 Jenis	820.818.150	Jumlah Jenis penyebaran informasi	3 Jenis	1.032.080.505	211.262.355

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Selisih Dengan Pagu Anggaran
		Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Jumlah Media Penerbitan Informasi Persentase Konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	8000 eksemplar 75%		Jumlah Media Penerbitan Informasi Persentase Konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	8000 eksemplar 75%		
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Tersedianya informasi yang disampaikan kepada masyarakat	350 Dokumen	188.523.000	Jumlah Tersedianya informasi yang disampaikan kepada masyarakat	350 Dokumen	1.146.216.650	957.693.650

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Selisih Dengan Pagu Anggaran
		Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		melalui PPID, Taprose, Website Persentase Diseminasi dan Layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	75%		melalui PPID, Taprose, Website Persentase Diseminasi dan Layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	75%		
2.16.02. 2.01.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Dokumentasi dan Publikasi	270 Dokumen 135	615.574.400	Jumlah Dokumentasi dan Publikasi	270 Dokumen 135	1.196.436.745	580.862.345

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Selisih Dengan Pagu Anggaran
		Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Jumlah Press rilis	Dokumen		Jumlah Press rilis	Dokumen		
2.16.02. 2.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Julah Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat Persentase komunitas masyarakat/mi tra strategis pemerintah daerah kabupaten/kot a yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kab/kota	10 Kali 100%	133.280.000	Julah Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat Persentase komunitas masyarakat/mi tra strategis pemerintah daerah kabupaten/kot a yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kab/kota	10 Kali 100%	158.153.500	24.873.500

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Selisih Dengan Pagu Anggaran
		Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	4.190.390.449	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	5.283.297.379	1.092.906.930
2.16.03. 2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Kominfo	100%	2.986.924.000	Persentase Perangkat Daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Kominfo	100%	4.016.384.150	1.029.460.150

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Selisih Dengan Pagu Anggaran
		Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		persentase perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemerintah daerah yang dmanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain instansi pemerintah			persentase perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemerintah daerah yang dmanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain instansi pemerintah			
2.16.03. 2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang	100%	2.986.924.000	Persentase Perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang	100%	4.016.384.150	1.029.460.150

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Selisih Dengan Pagu Anggaran
		Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		disediakan Dinas Kominfo			disediakan Dinas Kominfo			
2.16.03. 2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasi kan secara elektronik	75%	1.203.466.449	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasi kan secara elektronik	75%	1.266.913.229	63.446.780
2.16.03. 2.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Nilai Indeks Sistem Pemerintahan	0 cukup 0 baik	89.132.000	Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Nilai Indeks Sistem Pemerintahan	0 cukup 0 baik	86.912.000	-2.220.000

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Selisih Dengan Pagu Anggaran
		Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Berbasis Elektronik			Berbasis Elektronik			
2.16.03. 2.02.03	Pengelolaan Pusat data Pemerintah daerah	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data Persentase perangkat daerah yang mengggunakan layanan pusat data pemerintah Persentase perangkat daerah yang menyimpan	25% 90% 25%	174.638.000	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data Persentase perangkat daerah yang mengggunakan layanan pusat data pemerintah Persentase perangkat daerah yang menyimpan	25% 90% 25%	132.231.000	-42.407.000

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Selisih Dengan Pagu Anggaran
		Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		data di pusat data pemerintah			data di pusat data pemerintah			
2.16.03. 2.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Aplikasi yang terintegrasi	4 Aplikasi	362.055.200	Jumlah Aplikasi yang terintegrasi	4 Aplikasi	153.850.000	-208.205.200
2.16.03. 2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Sistem Informasi Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	4 Aplikasi 75%	299.195.995	Jumlah Sistem Informasi Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	4 Aplikasi 75%	376.782.580	77.586.585
2.16.03.	Pengembangan dan	Evaluasi	0 Baik	128.880.000	Evaluasi	0 Baik	113.710.000	-15.170.000

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Selisih Dengan Pagu Anggaran
		Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.02.09	Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	indikator dari kota cerdas Keikutsertaan pameran smart city Pelaksanaan Video Conference dan Video Streaming Pengembangan aplikasi tuban smart city	1 Kali 30 Kali 2 Aplikasi		indikator dari kota cerdas Keikutsertaan pameran smart city Pelaksanaan Video Conference dan Video Streaming Pengembangan aplikasi tuban smart city	1 Kali 30 Kali 2 Aplikasi		
2.16.03. 2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah website desa yang aktif Pengelolaan videotron	311 Website 4 Unit	149.565.254	Jumlah website desa yang aktif Pengelolaan videotron	311 Website 4 Unit	403.427.649	253.862.395

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Selisih Dengan Pagu Anggaran
		Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Peningkatan pengetahuan TIK masyarakat Persentase kegiatan (event), perangkatt daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM	311 orang 75%		Peningkatan pengetahuan TIK masyarakat Persentase kegiatan (event), perangkatt daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM	311 orang 75%		

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Selisih Dengan Pagu Anggaran
		Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Kominfo No.5/2015			Kominfo No.5/2015			
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			628.816.250			690.905.550	62.089.300
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerahdalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	20%	628.816.250	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerahdalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	20%	690.905.550	62.089.300
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di	Mengukur persentase	3 Jenis	628.816.250	Mengukur persentase	3 Jenis	690.905.550	62.089.300

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Selisih Dengan Pagu Anggaran
		Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah			perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah			
2.20.02. 2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Statistik yang disediakan Jumlah menara telekomunikasi yang dimonitoring dan evaluasi di wilayah kabupaten Tuban (menara)	450 Dokumen 250 Menara	212.102.200	Jumlah Dokumen Statistik yang disediakan Jumlah menara telekomunikasi yang dimonitoring dan evaluasi di wilayah kabupaten Tuban (menara)	450 Dokumen 250 Menara	254.191.500	42.089.300
.20.02.2.	Peningkatan	Jumlah	0 Kali	0	Jumlah	0 Kali	0	0

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Selisih Dengan Pagu Anggaran
		Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
01.02	kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Pelatihan (Capasiti bulding) bidang Statistik Jumlah SDM Statistik yang terlatih	0 Orang		Pelatihan (Capasiti bulding) bidang Statistik Jumlah SDM Statistik yang terlatih	0 Orang		
2.20.02. 2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Presentase pemenuhan ketersediaan metadata statistik sektoral	60 %	199.999.800	Presentase pemenuhan ketersediaan metadata statistik sektoral	60 %	219.999.800	20.000.000
2.20.02. 2.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Terlaksananya Sosialisasi data statistik sektoral	3 Kali	91.270.000	Terlaksananya Sosialisasi data statistik sektoral	3 Kali	91.270.000	0
2.20.02. 2.01.05	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah sistem aplikasi informasi pusat pengelolaan data statistik	1 Aplikasi	125.444.250	Jumlah sistem aplikasi informasi pusat pengelolaan data statistik	1 Aplikasi	125.444.250	0

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Selisih Dengan Pagu Anggaran
		Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		(PUSDATIK)			(PUSDATIK)			
2.20.02. 2.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah rekomendasi statistik sektoral	0 dokumen	0	Jumlah rekomendasi statistik sektoral	0 dokumen	0	0
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			127.666.000			123.673.000	-3.992.000
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAA N PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Keamanan informasi Pemerintah	25%	127.666.000	Tingkat Keamanan informasi Pemerintah	25%	123.673.000	-3.992.000
2.21.02. 2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Peningkatan Sistem Informasi yang Menerapkan Manajemen Keamanan Informasi	25%	127.666.000	Prosentase Peningkatan Sistem Informasi yang Menerapkan Manajemen Keamanan Informasi	25%	123.673.000	-3.992.000

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Selisih Dengan Pagu Anggaran
		Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.21.02. 2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Informasi yang menerapkan manajemen keamanan informasi	2 Sistem	127.666.000	Jumlah Sistem Informasi yang menerapkan manajemen keamanan informasi	2 Sistem	123.673.000	-3.992.000

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban Tahun 2022 ini merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-RKPD) dan Pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021-2026 dalam mendukung tercapaianya target RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026. Dengan demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban Tahun 2022 diharapkan mampu menjadi pedoman dan sarana untuk mewujudkan sasaran dan prioritas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dalam mewujudkan visi dan misi Bupati Tuban.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban Tahun 2022 ini akan dapat berjalan efektif dan efisien apabila didukung oleh semua pihak, baik internal yakni seluruh komponen dalam Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban itu sendiri dalam bentuk kerjasama yang solid, maupun pihak eksternal. Ketersediaan anggaran sangat menentukan dalam pencapaian terget-target kinerja yang telah ditentukan. Apabila dalam proses penganggaran ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan maka terhadap target-target kinerja dapat disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang ada, dan terhadap pencapaian target akhir dapat direncanakan baik pada Perubahan RKPD tahun berjalan maupun RKPD tahun selanjutnya sehingga sampai dengan akhir tahun masa Renstra seluruh target terhadap indikator kinerja tercapai.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2022 disusun dalam rangka menjaga konsistensi dan kesinambungan perencanaan pembangunan daerah serta untuk menjadi arah dan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2022. Untuk itu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian ini seluruh aparatur di Lingkungan Dinas

Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban Tahun 2022 dengan sebaik-baiknya.

2. Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2022 yang menjadi acuan bagi pelaksanan program dan kegiatan;
3. Dalam rangka menjaga efektivitas pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Untuk itu setiap Kepala Bidang dan Sekretaris berkewajiban menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja yang menjadi tanggung jawabnya setiap Tribulan kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY